

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN**



**PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
PERKOTAAN BERBASIS KEBUTUHAN PASAR MELALUI BALAI
BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BBPVP) DI
KOTA SEMARANG**

TIM PENGUSUL

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si	NIDN. 0004076801 (Ketua)
Abdul Malik, S.Pd, M. Pd	NIDN. 0010038106 (Anggota)
Dr. Ilyas, M.Ag	NIDN. 0001066606 (Anggota)
Nabilah Tia Novitasari	NIM. 1201417072 (Anggota)
Insan Fatriah	NIM. 1201418053 (Anggota)
Khotikah	NIM. 1201418071 (Anggota)
Purwadianto	NIP. 197003182000031001

Dibiayai oleh:

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: , tanggal bulan tahun 2022
Dana DIPA UNNES Tahun 2022
Nomor**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
AGUSTUS 2022**

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Judul Penelitian : Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar Melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Kota Semarang

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.
- b. NIDN : 0004076801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Pendidikan S2/S3 : S3
- e. Fakultas/Jurusan : FIP/Pendidikan Luar Sekolah
- f. Alamat Surel (e-mail) : sungkowo.edy@mail.unnes.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Anggota : Abdul Malik, S.Pd., M.Pd.
- b. NIDN : 0010038106
- c. Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
- d. Fakultas : Ilmu Pendidikan

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Anggota : Drs. Ilyas, M.Ag.
- b. NIDN : 0001066606
- c. Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
- d. Fakultas : Ilmu Pendidikan

Kerjasama dengan Institusional Lain

- a. Nama Instansi : Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- b. Alamat : Jl. Brigjen Sudiarto No.118, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
- c. Telepon/Fax/E-mail : 024-6712680

Mahasiswa yang terlibat : 3 orang

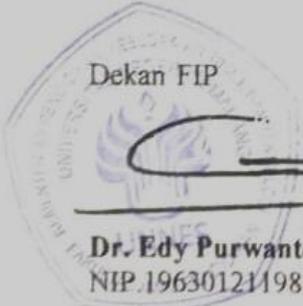
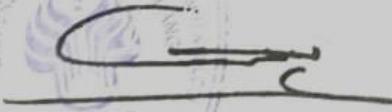
- a. Nama/NIM : Nabila Tia Novitasari / 1201417072
- b. Nama/NIM : Insan Fatriah/ 1201418053
- c. Nama/NIM : Khotikah/ 1201418071

Staff Pendukung Penelitian : 1 orang, Nama: Purwadianto

Alumni terlibat Penelitian : - orang,

Biaya yang diperlukan :

- a. Sumber dari LPPM Universitas Negeri Semarang : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- b. Sumber Lain, sebutkan..... : Rp. -
Jumlah : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)


Dekan FIP

Dr. Edy Purwanto, M.Si
NIP.196301211987031001

Semarang, 20 April 2022
Ketua Penelitian



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si
NIP. 196807042005011001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNNES



Prof. DUN Benny Riyanto, M.Hum.
NIP. 196204101987031003

RINGKASAN

Dampak yang timbul sejak pandemi tahun 2019 sungguh luar biasa dan hampir menyentuh seluruh sendi kehidupan, baik bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial budaya. Berdasarkan data BPS 2020, Dibidang ekonomi Indonesia pertumbuhannya mengalami penurunan dari 5,17% di tahun 2018, menjadi 5,02% di tahun 2019, dan 2,97% di kuartal I di tahun 2020, dan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana terlihat dari data BPS Kota Semarang tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 79.058 jiwa dan bila dibandingkan tahun tahun 2019 (sebelum pandemic) jumlah kemiskinan hanya mencapai 71.097, hal ini terjadi peningkatan hingga mencapai 7.961 jiwa.

Solusi dalam rangka mengatasi kemiskinan, diperlukan model strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan pasar khususnya wilayah perkotaan. Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang selama ini telah diterapkan diberbagai kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, namun hasil yang didapat tidak begitu signifikan atau tidak sesuai tujuan yang diinginkan. Hal itu terjadi lebih dikarenakan konsep model strategi pemberdayaan masyarakat, dimungkinkan belum diimplementasikan dengan benar atau sesuai model strategi pemberdayaan yang ada, disaat pendidikan dan pelatihan berlansung. Selama ini pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat (NGO) maupun Lembaga pemerintah. Sementara itu untuk kota Semarang lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan adalah Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dan *key-persons*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk melihat proses implementasi model strategi pemberdayaan serta kendala implementasi model pemberdayaan. Data sekunder yang digunakan adalah data penduduk yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan di Kota Semarang. Selain itu juga dikumpulkan data mengenai hal yang sama atau terkait, dari sumber jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian ini menghasilkan implementasi model strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan pasar serta dapat mengetahui kendala pelaksanaan pelatihan melalui BLKI di Kota Semarang.

Kata Kunci: pengembangan model strategi, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, pendidikan nonformal

PRAKATA

Topik masalah penelitian tentang Pengembangan Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Semarang selaras dengan *road map* penelitian institusi Universitas Negeri Semarang, merupakan penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk: (a) publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi/ terindeks scopus, (b) Hak Cipta, dan (c) prototipe Industri, serta (d) buku referensi.

Topik penelitian ini merupakan upaya strategis untuk merealisasikan program LP2M UNNES, yakni meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat dalam sustainable development. Disadari bahwa terselesaikannya laporan penelitian ini memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, untuk itu, dengan penuh kesadaran peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dana penelitian hibah pengembangan keilmuan.
2. Para penyelenggara pelatihan, instruktur, dan peserta pelatihan yang telah memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan Pengembangan Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Semarang
3. Pihak-pihak lain yang telah berkenan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai target yang dirancang.

Akhirnya semoga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam peningkatan mutu pembelajaran pendidikan nonformal.

Semarang, 20 April 2022

Ketua Peneliti,



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si

DAFTAR ISI

<i>COVER PENELITIAN</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN PENGEMBANGAN</i>	<i>i</i>
<i>RINGKASAN</i>	<i>ii</i>
<i>PRAKATA</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	6
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	7
<i>BAB 1. PENDAHULUAN</i>	8
Latar Belakang.....	8
Rumusan Masalah Penelitian.....	9
<i>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</i>	10
<i>BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</i>	13
Tujuan Penelitian.....	13
Manfaat Penelitian.....	13
<i>BAB 4. METODE</i>	14
Fokus Penelitian	14
Sumber Data	15
Teknik Pengumpulan Data	15
Interview/wawancara.....	15
Observasi/Pengamatan.....	15
Dokumentasi.....	15
Uji Kelayakan Model.....	16
<i>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN</i>	17
Hasil Penelitian.....	17
Model strategi pemberdayaan masyarakat saat ini	17
Desain model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalar Pendidikan nonformal.....	17
Kelayakan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalar Pendidikan nonformal.....	18
Hasil Uji Praktisi	19

Hasil Uji Pakar 1.....	20
Hasil Uji Pakar 2.....	20
Hasil Uji Pakar 3.....	20
Hasil Uji Pakar 4.....	21
Hasil Uji Pakar 5.....	21
Hasil Uji Pakar 6.....	22
Pembahasan Penelitian	24
Model Faktual.....	24
Model Konseptual.....	26
Model Hipotetik.....	27
Model Pengembangan	27
<i>BAB 6. PENUTUP</i>	29
Kesimpulan.....	29
Saran	29
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	30

DAFAR TABEL

Tabel 1. Hasil Validasi Praktisi	19
Tabel 2. Hasil Validasi Pakar 1.....	20
Tabel 3. Hasil Validasi Pakar 2.....	20
Tabel 4. Hasil Validasi Pakar 3.....	21
Tabel 5. Hasil Validasi Pakar 4.....	21
Tabel 6. Hasil Validasi Pakar 5.....	22
Tabel 7. Hasil Validasi Pakar 6.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan	12
Gambar 2. Alur/Tahapan Penelitian Pengembangan	14
Gambar 3. Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar	23

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kemiskinan sejak dulu sampai sekarang belum bisa diatasi secara komperhensip, masih terdapat berbagai kendala yang harus diselesaikan, baik sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Terlebih lagi dimasa pamdemi seperti saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang terkena COVID 19 semakin meningkat, data hingga bulan maret 2021 mencapai 1,46 juta jiwa dan yang dinyatakan sembuh mencapai 1,29 juta, sementara yang meningggal dunia mencapai 39.550 jiwa. Dampak yang timbul sejak pandemi tahun 2019 sungguh luar biasa dan hampir menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial budaya. Berdasarkan data BPS 2020, Dibidang ekonomi Indonesia pertumbuhannya mengalami penurunan dari 5,17% di tahun 2018, menjadi 5,02% di tahun 2019, dan 2,97% di kuartal I di tahun 2020, dan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana terlihat dari data BPS Kota Semarang tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 79.058 jiwa dan bila dibandingkan tahun tahun 2019 (sebelum pandemic) jumlah kemiskinan hanya mencapai 71.097, hal ini terjadi peningkatan hingga mencapai 7.961 jiwa, padahal tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin kota Semarang mengalami penurunan. Terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan yang begitu tajam, jelas mempengaruhi kehidupan umat manusia, dari semula mereka bekerja menjadi tidak bekerja atau pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran tertutup, dari semula yang memiliki pendapatan, menjadi tidak berpendapatan atau pendapatan menjadi menurun, yang kemudian menimbulkan daya beli masyarakat rendah. Fenomena peningkatan kemiskinan yang begitu besar secara nasional akan memperburuk sendi ekonomi kehidupan manusia, hal tersebut juga terjadi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang adalah wilayah yang berada di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Menurut BPS (2020) Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.680.417 terdiri dari 831.757 laki-laki dan 848.660 perempuan, yang terbagi di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Berdasarkan data jumlah penduduk yang tinggal di Kota Semarang yang mengalami ekonomi lemah tahun 2021 mencapai 79.058 jiwa. Hal tersebut dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), selain itu, mereka yang melakukan usaha mandiri produksinya terjadi penurunan, dikarenakan daya beli masyarakat rendah. Pemerintah dalam menanggulangi masa pandemi telah melakukan berbagai upaya termasuk pemberian bantuan social (BANSOS), bantuan usaha serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan di jalur Pendidikan nonformal.

Salah satu solusi dalam rangka mengatasi kemiskinan, diperlukan pengembangan model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar khususnya wilayah perkotaan. Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang selama ini telah diterapkan diberbagai kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya di wilayah perkotaan, namun hasil yang didapat tidak begitu siqnifikan atau tidak sesuai tujuan yang diinginkan. Hal itu terjadi lebih dikarenakan konsep model strategi pemberdayaan masyarakat,

dimungkinkan belum diimplementasikan dengan benar atau sesuai model strategi pemberdayaan yang ada, disaat pendidikan dan pelatihan berlangsung.

Selama ini pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat (NGO) maupun lembaga pemerintah. Sementara itu untuk kota Semarang lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan adalah Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dimana untuk kota Semarang berlokasi di jalan Majapahit no. 118 Semarang. BLKI kota Semarang memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas tenaga kerja dibidang pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigras, diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Mereka dilatih agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pasar, sehingga nantinya mereka akan memiliki keterampilan dan diharapkan juga memiliki mata pencaharian yang akan menupang kehidupannya. Bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat tersebut serta proses pembelajaran di BLK, sudah barang tentu membutuhkan pengembangan model strategi pemberdayaan masyarakat sesuai sasaran dan kebutuhan pasar, untuk itu penelitian ini akan mengungkap bagaimana pengembangan model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar pada jalur Pendidikan nonformal yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja di Kota Semarang

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana model strategi pemberdayaan masyarakat saat ini ?
- b. Bagaimana desain model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalur Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) kota Semarang?
- c. Bagaimana kelayakan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalur Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) kota Semarang ?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai suatu keadaan tidak terpenuhinya hak-hak manusia, asalkan dua persyaratan dibawah ini benar-benar terpenuhi: (1) Hak-hak manusia yang bersangkutan harus merupakan hak-hak yang bersesuaian dengan kemampuan-kemampuan yang oleh masyarakat dipertimbangkan bersifat mendasar. (2) Adanya kendali yang tidak memadai terhadap sumber-sumber ekonomi, dimana kendali yang tidak memadai tersebut bersifat mempengaruhi mata-rantai hubungan sebab-akibat yang mengakibatkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya hak-hak manusia itu sendiri. Dalam hal ini, usaha menunjang hak-hak manusia untuk berpartisipasi secara aktif didalam proses pembuatan berbagai jenis keputusan akan sangat menentukan bagi usaha meningkatkan kualitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat miskin.

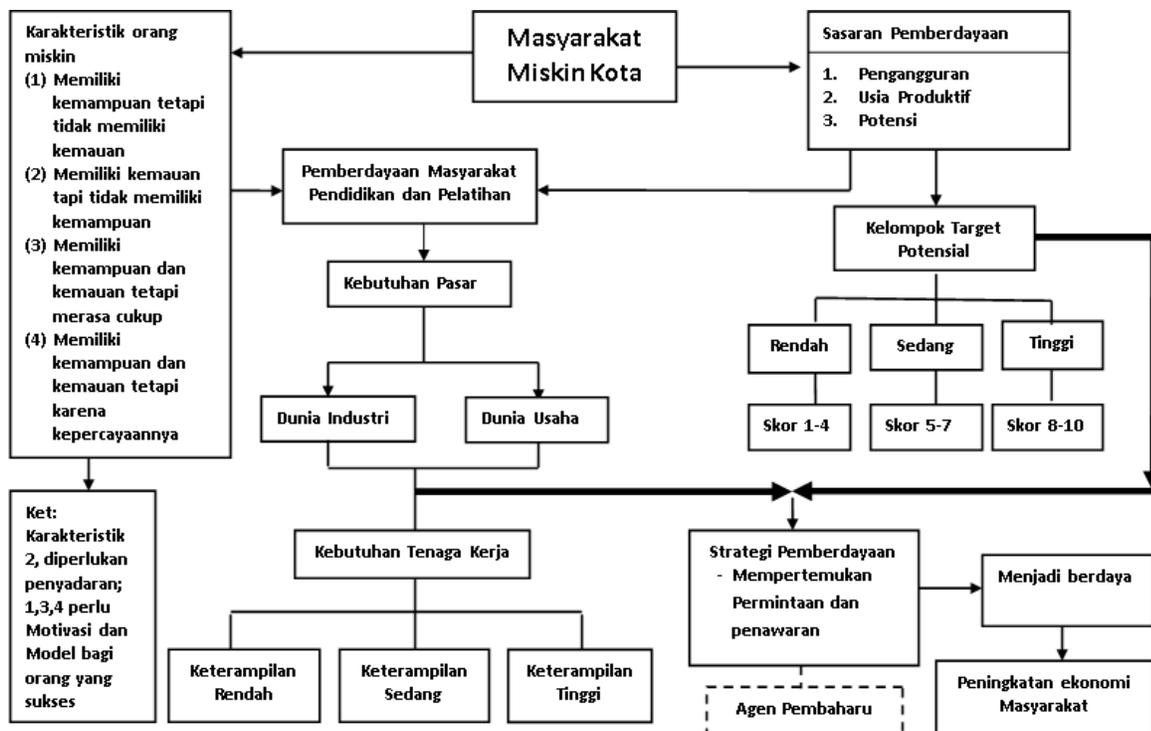
Salah satu cara mengatasi kemiskinan perkotaan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperanserta dalam pembangunan. Sebagai suatu proses pembelajaran, maka ia adalah suatu proses peningkatan kemampuan pada seseorang atau kelompok orang agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi yang dilakukan oleh pekerja sosial di India dan itu memiliki dampak atau efek positif dalam pemberdayaan masyarakat [9]. Selain itu agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik membutuhkan model, sebagaimana hasil penelitian Shildrick dan MacDonald [10], tentang model kemiskinan di Australia yang menggambarkan strategi dan dampak kemiskinan, dan pada akhirnya memiliki dampak yang lebih besar pada kebijakan anti- kemiskinan.

Dari perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (*human investment*) yang handal, untuk nantinya menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan harus mampu melahirkan lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Di sinilah maknanya, mengapa pendidikan baik, formal maupun nonformal, harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, sekaligus menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan (Cheng, 1992). Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan, mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle

mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan secara partisipatoris [11].

Pandangan yang lebih jelas dikemukakan oleh McArdle [11] bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pola demikian sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, diantara banyak pilihan yang ada dimasyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya seluruhnya dikerjakan oleh para profesional atas nama “pemberdayaan”. Oleh karena itu, banyak kritikan yang diarahkan terhadap pendekatan pemberdayaan. Pendekatan tersebut dapat gagal menjalankan fungsinya dalam proses kontrol terhadap masyarakat untuk akses terhadap sumber. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru menjadikan masyarakat menjadi tidak mampu diberdayakan. Pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan investasinya, pengetahuan akan menjadi dasar terjadinya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, dimana pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi terutama dalam kedudukan kerja jenis “*white collar*” dan jenis profesional. Pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi hanya didalam pekerjaan jenis profesional, dan mengangjurkan agar lembaga dan pelatihan mencurahkan perhatian pada semua jenis keahlian dan kompetensi yang diperlukan oleh armada kerja di masa yang akan datang sambil tentu saja terus mengerjakan keahlian-keahlian dasar seperti matematika, membaca, dan berpola pikir cerdas [12].

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan telah dianalisis pada penelitian sebelumnya dengan skim pusat kajian dana DIPA LPPM tahun 2019 [13], hasilnya diringkas dalam uraian berikut. Terdapat beberapa alur strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (1) masyarakat miskin perkotaan (2) sasaran pemberdayaan (3) target sasaran dan potensi (4) pendidikan dan pelatihan (5) karakteristik dan keinginan masyarakat (6) kebutuhan pasar dunia usaha/dunia industri (7) mempertemukan antara hasil pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kelompok target potensi oleh Agen Pembaharu (8) masyarakat berdaya (9) meningkatkan ekonominya. yang kemudian strategi ini dijadikan suatu model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan [13]. Alur tersebut digambarkan pada strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar berikut.



Sumber: Hostter [9], Mulyono [13] dengan modifikasi seperlunya

Gambar 1. Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

Mulyono menyatakan bahwa [13] ditetapkan sebagai model sebagaimana yang diungkapkan oleh [9], menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja social (agen pembaharu) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan di atas perlu adanya pemetakan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan basic yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan micro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

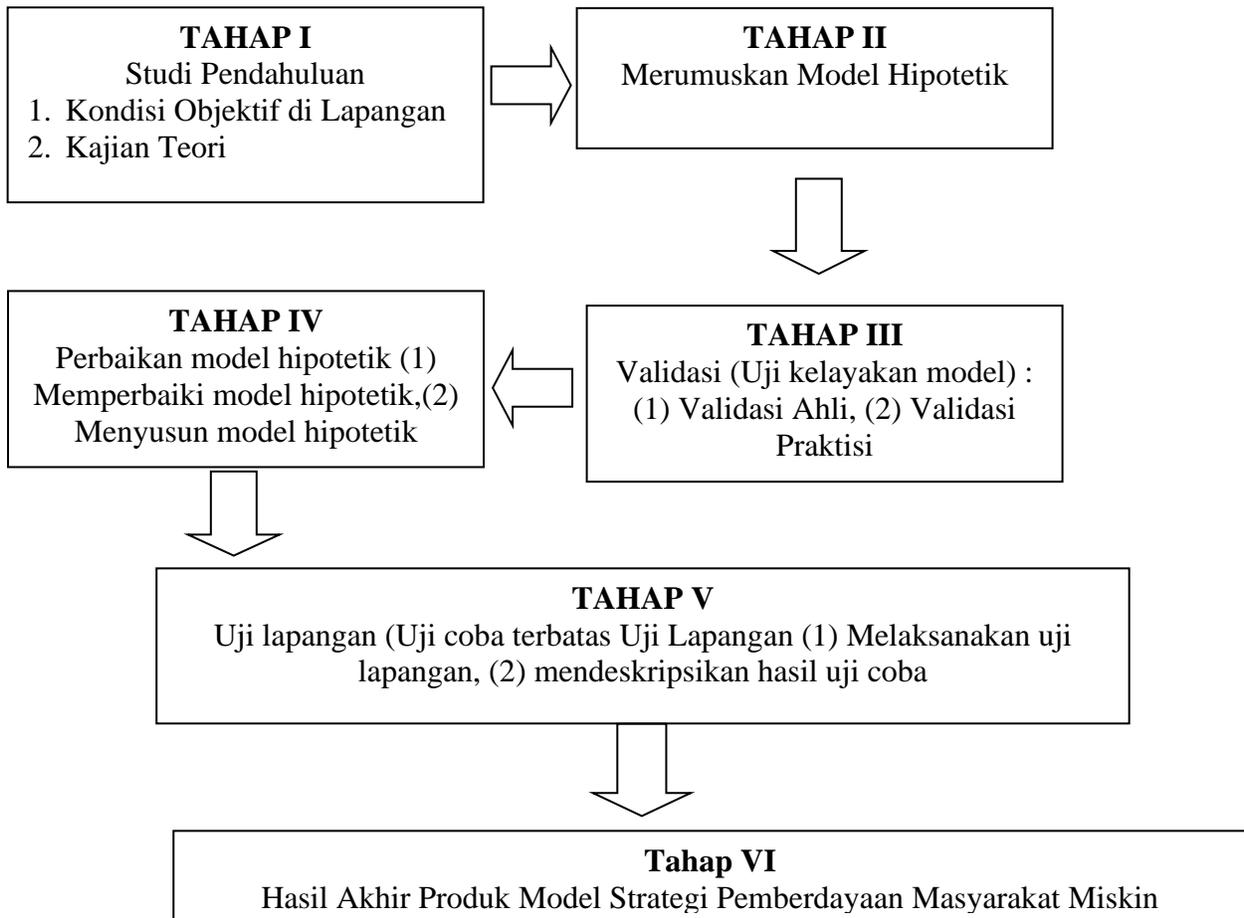
- a. Menganalisis model strategi pemberdayaan masyarakat saat ini ?
- b. Menganalisis desain model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar di jalur Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) kota Semarang?
- c. Menganalisis kelayakan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar di jalur Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) kota Semarang?

Manfaat Penelitian

- a. Menemukan dan mendeskripsikan kondisi faktual model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar di jalur Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) kota Semarang
- b. model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan memiliki manfaat yang sangat penting, sebab dengan adanya model ini dapat mengetahui output kegiatan pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dimana rekomendasi dari pelaksanaan pemberdayaan sebelumnya mengarahkan analisis tindak lanjut penetapan tujuan pemberdayaan untuk memperhatikan *kebutuhan pasar*.
- c. Pengelola program pemberdayaan masyarakat, dapat memanfaatkan model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dengan modifikasi sesuai dengan peta kebutuhan-masalah dan kondisi lembaga atau masyarakat.

BAB 4. METODE

Penelitian ini menggunakan metode dan desain penelitian pengembangan (*research and development*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah dari [17] langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian dan pengembangan, antara lain: (a) studi pendahuluan, (b) perencanaan, (c) pengembangan model hipotetik, (d) penelaahan model hipotetik, (e) revisi, (f) uji coba terbatas, (g) revisi hasil uji coba, (h) uji coba lebih luas, (i) revisi model akhir, dan (j) diseminasi dan sosialisasi. Namun, dalam penelitian ini kesepuluh langkah tersebut akan dimodifikasi menjadi enam langkah yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Lebih jelas langkah-langkah pelaksanaan penelitian digambarkan pada gambar 3.1.



Gambar 2. Alur/Tahapan Penelitian Pengembangan

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model strategi pemberdayaan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelatihan dengan menggunakan model strategi pemberdayaan masyarakat. Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Kota Semarang, adapun

sebagai subyek penelitian adalah warga belajar pendidikan dan pelatihan berjumlah 5 orang, fasilitator/tutor 5 orang dan sebagai informan adalah Kepala BLK kota Semarang.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang proses, implementasi model strategi pemberdayaan masyarakat dan kendala dalam implementasi model. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di BLK dan wawancara dengan pengelola, fasilitator dan warga belajar.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

Interview/wawancara

Maksud diadakannya wawancara ini antara lain untuk menggali berbagai informasi terkait dengan proses pendidikan dan pelatihan, mengimplementasikan model, serta melihat kedalam dalam implementasi model strategi pemberdayaan masyarakat mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keperdulian dan lain-lain. Dalam proses ini, hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dari situasi wawancara

Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung untuk mengetahui dan menguji suatu kebenaran, jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, hal ini berarti penulis harus mengamati secara langsung terhadap peristiwa tersebut.

Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari sumber manusia, juga diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, mengapa dan di mana. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau dokumen-dokumen, misalnya struktur organisasi, keadaan fasilitator, daftar inventaris dan dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan bagi warga belajar. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak terjangkau dalam observasi maupun wawancara. Penggunaan teknik dokumentasi didasarkan pada beberapa alasan antara lain; (1) selalu tersedia dan murah ditinjau dari segi waktu, (2)

merupakan informasi yang stabil dan kaya, (3) sebagai bukti telah terjadi suatu peristiwa, (4) refleksi situasi yang terjadi di masa lampau, dan (5) dapat dianalisis.

Uji Kelayakan Model

1. Uji kelayakan model. Guna menguji kelayakan model hipotetik, peneliti melaksanakan uji ahli dan uji praktisi. Uji ahli dilakukan oleh pakar pemberdayaan dan manajemen, sedangkan uji praktisi dilakukan oleh praktisi
2. Uji lapangan terbatas/uji empirik. Dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari model yang dikembangkan

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Model strategi pemberdayaan masyarakat saat ini

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) merupakan salah satu pusat pelatihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah. BBPLK Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto No 118 Semarang Jawa Tengah. BBPLK Semarang didirikan pada tahun 1951 dengan nama Pusat Latihan Kerja (PLK) Semarang, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Perburuhan. Pada tahun 1979 kepanjangan PLK Semarang menjadi Pusat Latihan Kejuruan (PLK) Semarang, yang bertanggung jawab kepada Lembaga Bina Kerja. Pada tahun 1982 PLK Semarang dengan bantuan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) direlokasi dari daerah Bubaan Semarang ketempat yang sekarang di Pedurungan Semarang dan berganti nama menjadi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang.

Pada masa otonomi daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, sejak tahun 2001 sampe dengan tahun 2004 BLKI Semarang menjadi UPTD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2005 BLKI Semarang kembali dialihkan pengolahannya kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan selanjutnya tahun 2006, BLKI Semarang merupakan UPTP Ditjen Binalattas Depnakertrans yang pada tahun 2010 menjadi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2015 Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berubah nomenklatur menjadi Kementrian Ketenaga Kerjaan dan sesuai Permenaker No 21 Tahun 2015 menjadi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang.

Tracer alumni di BBPLK Semarang merupakan survey dari kuisioner yang dibuat untuk mengetahui informasi-informasi para alumni yang telah berada didalam masyarakat. BBPLK Semarang sebagai salah satu pengembang Sumber Daya Manusia yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam mengembangkan amanat oleh pemerintah BBPLK Semarang tentu harus mengetahui bahwa para alumninya sudah terserap dalam dunia industri dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Tracer alumni juga sebagai tolok ukur sejauh mana proses pendidikan yang dilakukan oleh BBPLK Semarang kepada alumni apakah mereka benar-benar berkompeten dalam persaingan dunia industri atau mungkin ada kekurangan yang dialami para alumni ketika berada dalam dunia industri. Sehingga dengan adanya tracer alumni BBPLK Semarang dapat memperbaiki proses pendidikan yang telah dilakukan. Dimana data survey tracer ini akan diolah untuk kepentingan pembuatan laporan dari data-data yang telah diperoleh dari para alumninya.

Desain model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalur Pendidikan nonformal

Salah satu cara mengatasi kemiskinan perkotaan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemberdayaan adalah proses untuk mengembangkan potensi masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan. Pemberdayaan tak luput dari

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses meningkatnya kemampuan seseorang atau kelompok untuk lebih dapat memahami dan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik, sebagai upaya perbaikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi yang dilakukan oleh pekerja sosial di India dan itu memiliki dampak atau efek positif dalam pemberdayaan masyarakat (R. M. Van Voorhis, 2006). Selain itu agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik membutuhkan model, sebagaimana hasil penelitian (Shildrick dan MacDonald, 2013), tentang model kemiskinan di Australia yang menggambarkan strategi dan dampak kemiskinan, dan pada akhirnya memiliki dampak yang lebih besar pada kebijakan anti- kemiskinan.

McArdle (1989) mengemukakan bahwa sangat penting jika masyarakat harus aktif dan ikut berpartisipasi mengambil keputusan dalam pemberdayaan agar mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri. Kenyataannya, proses tersebut diambil alih dan didominasi oleh para profesional dari suatu kelompok atau golongan tertentu. Hal tersebut justru membuat masyarakat tidak bisa diberdayakan. Pendidikan serta pelatihan akan meningkatkan investasinya, pengetahuan akan menjadi dasar terjadinya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, dimana pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi terutama dalam kedudukan kerja jenis “white collar” dan jenis profesional. Pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi hanya didalam pekerjaan jenis profesional, dan menganjurkan agar lembaga dan pelatihan mencurahkan perhatian pada semua jenis keahlian dan kompetensi yang diperlukan oleh armada kerja di masa yang akan datang sambil tentu saja terus mengerjakan keahlian-keahlian dasar seperti matematika, membaca, dan berpola fikir cerdas (Kalleberg, 2008).

Kelayakan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar dijalur Pendidikan nonformal

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan uji kelayakan model konseptual adalah dengan pengkajian secara komprehensif terhadap model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas yang dikembangkan dalam persiapan/petunjuk pelaksanaan model yang menjadi acuan untuk diimplementasikan. Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan teknik respon terperinci. Peneliti menyampaikan model melalui *zoom meeting* yang disertai dengan instrumen penilaian berupa lembar validasi yang berbentuk skala (data kuantitatif) dan saran/masukan (data kualitatif) yang dikirim melalui google form.

Hasil Uji Praktisi

Pada penelitian ini, validator praktisi terdiri dari 60 orang, yaitu 10 pekerja dan 50 pekerja yang menjadi supervisor di tempat penelitian sehingga sudah berpengalaman memberikan masukan. Adapun contoh saran/masukan yang diberikan oleh ke-60 validator praktisi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Validasi Praktisi

Praktisi	Skor Nilai	Simpulan	Saran
1	sangat baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	Baik
2	sangat baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	Menarik dan baik
3.	Sangat baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	bisa digunakan dan bisa menjadi contoh dan bermanfaat
4	sangat baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	Lengkap, jelas dan selamat melaksanakan penelitian
5	sangat baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	Baik
6	Baik	Model ini sudah siap digunakan dengan sedikit perbaikan sesuai saran.	Baik

Uji kelayakan model hipotetik merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang dikembangkan akan lebih efektif dari produk yang sudah ada (sebelum dikembangkan). Uji kelayakan model hipotetik ini dilakukan melalui: (1) penilaian pakar yang berjumlah 6 orang (validasi pakar) dan (2) penilaian praktisi/guru (validasi praktisi) yang berjumlah 60 orang. Praktisi yang dipilih adalah kepala dan jajaran pengurus. Secara operasional validasi pakar dimaksudkan untuk menilai kelayakan setiap komponen model dari sisi keilmuan, sedangkan validasi praktisi lebih ditekankan pada kelayakan model yang dikembangkan untuk diimplementasikan.

Hasil Uji Pakar 1

Pakar pertama yang menjadi validator ahli adalah Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd. Beliau adalah seorang doktor yang menguasai bidang manajemen. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke-1 diperoleh skor 105. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori baik. Beberapa saran dari validator ke-1 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Validasi Pakar 1

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/ Perbaikan Model
Bagian pendahuluan, peneliti bersifat netral terkait kualitas pendidikan	Dalam pendahuluan belum bersifat netral	Bersifat netral dalam menyatakan kualitas pendidikan
Mencantumkan sumber buku dan referensi untuk memperkuat model	Belum mencantumkan referensi untuk memperkuat model	Mencantumkan sumber buku dan referensi untuk memperkuat model

Hasil Uji Pakar 2

Pakar kedua yang menjadi validator ahli adalah Prof. Trijoko Raharjo, M.Pd. Beliau adalah seorang profesor yang menguasai bidang manajemen pendidikan. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke-2 diperoleh skor 110. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori sangat baik. Beberapa saran dari validator ke-2 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Validasi Pakar 2

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/Perbaikan Model
Gambar model yang terkait dengan teori	Model belum terkait dengan teori	Model disesuaikan dengan teori

Berdasarkan hasil uji kelayakan model kemudian peneliti melakukan perbaikan/revisi terhadap model hipotetik sesuai masukan/rekomendasi yang diberikan oleh pakar/ahli

Hasil Uji Pakar 3

Pakar ketiga yang menjadi validator ahli adalah Prof. Dr Fakrudin M.Pd. Beliau adalah seorang profesor yang menguasai bidang pendidikan luar sekolah. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke-3 diperoleh skor 112. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori sangat baik. Beberapa saran dari validator ke-3 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Validasi Pakar 3

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/ Perbaikan Model
Pada buku model belum jelas terkait prosedur	Belum jelas terkait prosedur	Pengendalian dan pengembangan standart sudah diperjelas
Dokumen dilengkapi dengan prosedur	Dokumen dilengkapi	Dokumen dilengkapi

Hasil Uji Pakar 4

Pakar yang keempat yang menjadi validator ahli adalah Prof. Yoyon Suryono, M.Pd. Beliau adalah seorang profesor yang menguasai bidang pendidikan luar. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke-4 diperoleh skor 114. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori sangat baik. Beberapa saran dari validator ke-4 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.Hasil Validasi Pakar 4

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/Perbaikan Model
Tahapan manajemen perlu disederhanakan agar mudah dipahami dan terapkan	Model belum sederhana	Mensederhanakan model agar mudah digunakan dan dipahami

Berdasarkan hasil uji kelayakan model kemudian peneliti melakukan perbaikan/revisi terhadap model hipotetik sesuai masukan/rekomendasi yang diberikan oleh pakar/ahli.

Hasil Uji Pakar 5

Pakar yang kelima yang menjadi validator ahli adalah Dr. Tri Suminar, S.Pd., M.Pd.. Beliau adalah seorang doktor yang menguasai bidang manajemen. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke 5 diperoleh skor 114. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori sangat baik. Beberapa saran dari validator ke-5 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Validasi Pakar 5

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/Perbaikan Model
Pastikan instrumen	Instrumen belum sesuai	Menyesuaikan instrumen
Profilkan model konseptual dan model hipotetik	Belum ada profil model konseptual dan hipotetik	Membuat profil model konseptual dan model hipotetik

Berdasarkan hasil uji kelayakan model kemudian peneliti melakukan perbaikan/revisi terhadap model hipotetik sesuai masukan/rekomendasi yang diberikan oleh pakar/ahli.

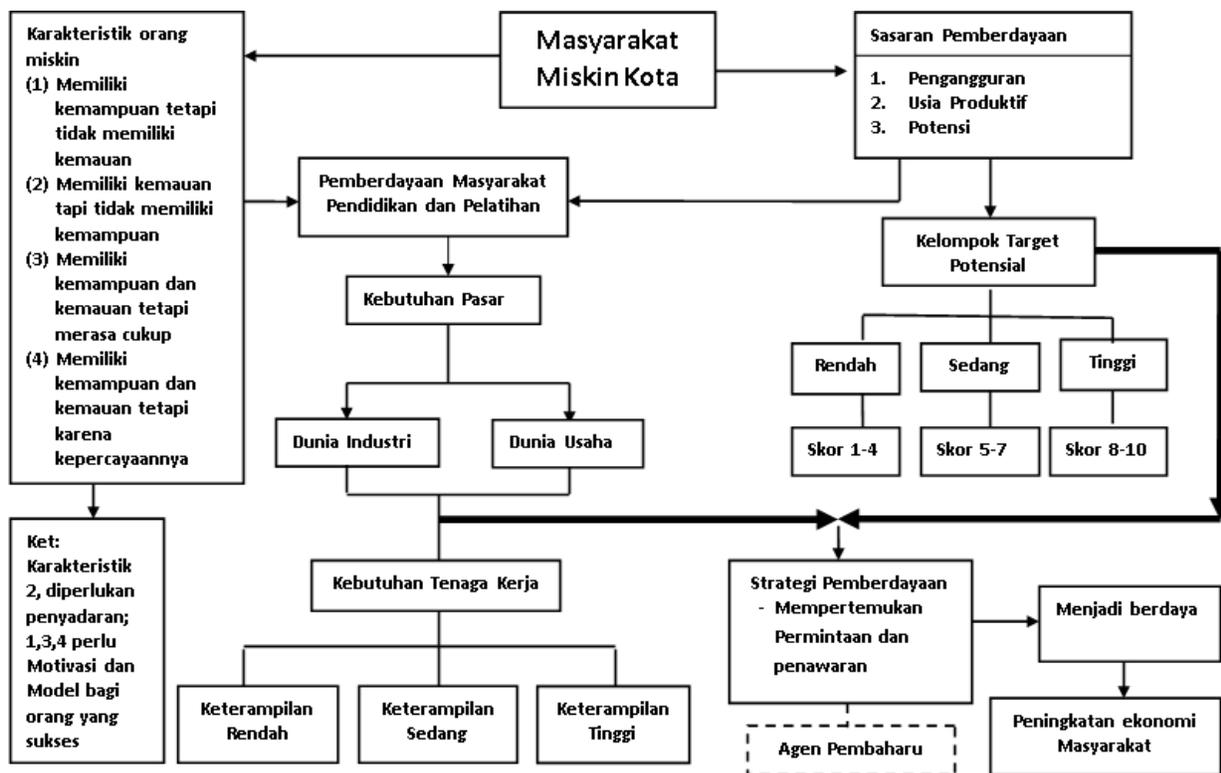
Hasil Uji Pakar 6

Pakar keenam yang menjadi validator ahli adalah Dr. Amin Yusuf, M.M. Beliau adalah seorang doktor yang menguasai bidang manajemen dan organisasi pendidikan. Hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh pakar ke-6 diperoleh skor 84. Skor tersebut menunjukkan bahwa model yang disusun termasuk dalam kategori baik. Beberapa saran dari validator ke-6 dan perbaikan yang dilakukan oleh peneliti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Validasi Pakar 6

Komentar dan Saran	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi/Perbaikan Model
Menyesuaikan diskusi baik teori, model dan <i>flowchat</i>	Belum ada flowchat	Menyesuaikan model dari hasil diskusi baik teori, model dan <i>flowchat</i>

Berdasarkan hasil uji kelayakan model kemudian peneliti melakukan perbaikan/revisi terhadap model hipotetik sesuai masukan/rekomendasi yang diberikan oleh pakar/ahli. Kemudian model divalidasi oleh pakar selanjutnya model di uji kelayakannya oleh praktisi sehingga menjadikan model pengembangan dari model yang ditawarkan.



Gambar 3. Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja sosial (agen pembaharuan) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan di atas perlu adanya pemetaan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan *basic* yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan mikro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan.

Pembahasan Penelitian

Model Faktual

Implementasi program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dimulai sejak Februari 2001 dengan Dasar Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dari pemaparan di atas mengenai gambaran program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tujuannya adalah untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Semarang agar para pencari kerja mendapatkan keterampilan berupa pelatihan agar menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha. Bila ditinjau dari tujuan program pelatihan kerja yaitu untuk memberikan pancingan dengan cara diberikan keterampilan berupa pelatihan agar para peserta yang mengikuti pelatihan kerja dapat memiliki keahlian.

Sasaran program pelatihan ini yaitu diperuntukkan bagi para pencari kerja pengangguran. Kegiatan pelatihan kerja ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang selaku satuan kerja perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengenai masalah ketenagakerjaan. Walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diterapkan, hal ini ditandai dengan jumlah pengangguran cukup tinggi di Kota Semarang. Perencanaan program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini sangat penting untuk menuntaskan masalah sosial ketenagakerjaan terutama pengangguran di Kota Semarang. 1. Analisis Penerimaan peserta pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang terletak di Kota Semarang. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tersebut memiliki peran sebagai penyelenggara urusan pemerintah Daerah Kota Semarang, khususnya di Bidang Ketenagakerjaan. Seperti yang tercantum pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja yaitu “Terwujudnya Ketenagakerjaan yang produktif, dinamis dan industrial dan peace yang berkeadilan” Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berusaha mengoptimalkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat lokal. Program pelatihan kerja ini tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Semarang agar para pencari kerja, mendapatkan keterampilan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sehingga para pencari kerja memiliki kualitas dan produktivitas. Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melaksanakan pelatihan bagi pencari kerja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang informan yang menjelaskan tujuan diadakan program pelatihan sebagai berikut : “Tujuannya untuk mengurangi pengangguran, artinya yang bisa ditempatkan ke sektor formal ada juga yang ke sektor informal, usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan, ketika perusahaan itu butuh, bisa”.(wawancara dengan Kepala Bidang Produktivitas Tenaga Kerja, hari Rabu, 20 februari 2022 pukul 10.15 WIB di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang) Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dengan diadakannya program pelatihan kerja ini adalah untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Semarang dengan cara memberikan keterampilan kepada para pencari

kerja atau pengangguran agar dapat menjadi bekal untuk masuk ke sektor formal atau bekerja maupun usaha (berwirausaha) Hal ini juga senada dengan informan Staf Bidang Produktivitas Tenaga Kerja Kota Semarang menjelaskan: “Mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran, setengah pengangguran itu semacam seperti kita punya sawah, disaat panen dia kan beraktivitas, setelah sawah itu paceklik, dia nganggur.

Tujuan kita memberi kegiatan seperti pengerasan jalan, kan dibayar sama kita. Itu maksudnya, jadi kita kenapa ada anggaran APBN, APBD, itu berbeda. Kalau pengangguran ya jelas-jelas pengangguran, kita tidak memberi pelatihan untuk mereka, keterampilan. Kalau memang tidak bekerja dan tidak punya kesempatan kerja. Wirausaha begitu. Makanya kita kasih pelatihan dan dikasih alat-alat itu. Sasaran nya kita tuh pengangguran itu, menyisir, tapi semua itu terlepas dari masyarakat sendiri, mental segala macamnya. Kita sudah memberi, kita sudah kasih pancingan” (wawancara dengan staf pelaksanaan seksi pelatihan kerja hari Rabu, 20 februari 2021 pukul 10. 30 WIB di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan program pelatihan kerja ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu untuk mengurangi angka pengangguran dan setengah pengangguran. Untuk pengangguran yaitu memberi pelatihan berupa keterampilan untuk berwirausaha.

Sedangkan yang dimaksud setengah pengangguran disini maksudnya memberi kegiatan dengan dibayar untuk mengisi kekosongan ketika tidak bekerja, semua kegiatan pelatihan yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari mental masyarakat sendiri: Hal ini juga dijelaskan oleh informan Program Pelatihan Kerja menerangkan: “di Disnaker ini pelatihan yang diselenggarakan sasarannya pengangguran. Jadi kan nantinya supaya wirausaha mandiri, ada yang berbasis kompetensi, itu nanti supaya bisa bersaing di dalam pasar kerja”. (wawancara dengan kasubag program pelatihan kerja, Rabu, 20 februari 2022 pukul 11. 05 WIB di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang) 2. Analisis perencanaan Program Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dalam perencanaan program pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja mengupayakan serangkaian kegiatan untuk program pelatihan kerja. Pada saat akan diadakan pelatihan kerja, pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang hanya menyurati pihak kecamatan, sebagai pemberitahuan akan diadakan program pelatihan di kecamatan yang bersangkutan dan berdasarkan observasi diketahui pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja terhadap kecamatan yang bersangkutan pada beberapa kasus mendadak, sehingga pihak kecamatan dalam merekrut peserta pun tak jarang menjadi asal dapat Selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja sebagai penyelenggara perencanaan program pelatihan kerja tidak melakukan evaluasi dan tidak ada tindak lanjut setelah dilaksanakan program pelatihan kerja karena keterbatasan waktu, anggaran dan personil.

Jadi pada akhirnya selesai program, selesai pula kegiatan, tak jarang bahwa peserta yang mengikuti tidak menjalankan apa yang sudah didapatnya dari pelatihan tersebut. Dalam menetapkan instruktur pihak Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan binaan. Prosedur penetapan instruktur nya yaitu dengan membuat surat permohonan kepada pihak LPK maupun BLK atas tandatangan Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian setelah mendapat persetujuan di SK kan. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara bahwa perencanaan

program pelatihan kerja di Kota Semarang sudah cukup baik namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

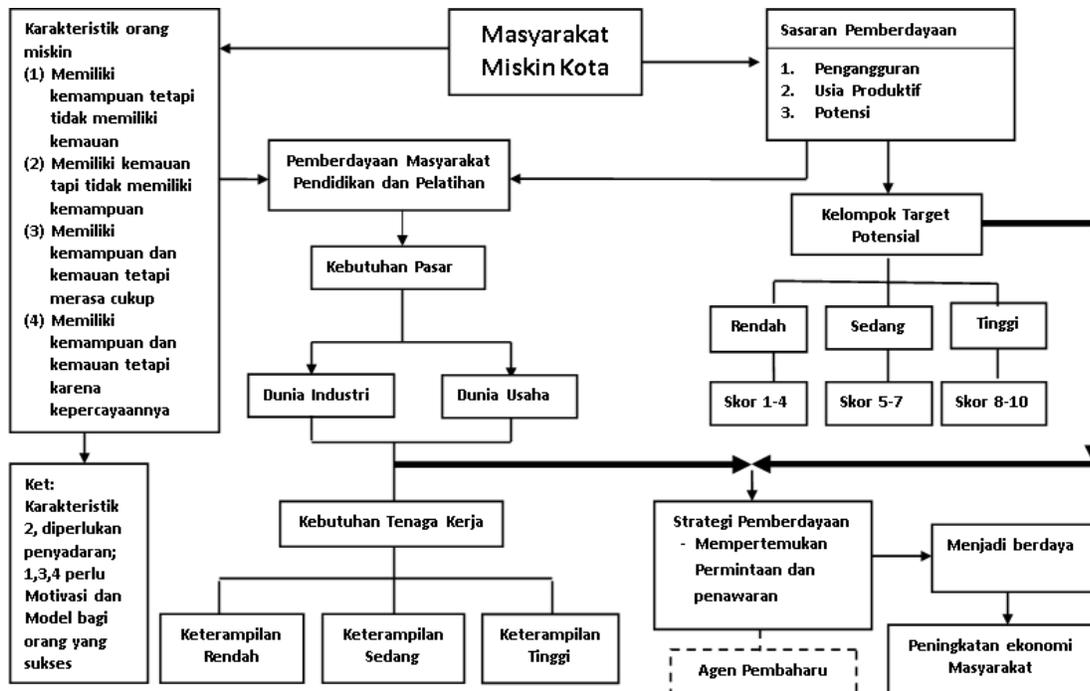
Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar yang telah dihasilkan diuraikan bahwa terdapat beberapa alur strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (1) masyarakat miskin perkotaan (2) sasaran pemberdayaan (3) target sasaran dan potensi (4) pendidikan dan pelatihan (5) karakteristik dan keinginan masyarakat (6) kebutuhan pasar dunia usaha/dunia industri (7) mempertemukan antara hasil pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kelompok target potensi oleh agen pembaharuan (8) masyarakat berdaya (9) meningkatkan ekonominya. yang kemudian strategi ini dijadikan suatu model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja sosial (agen pembaharuan) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan di atas perlu adanya pemetaan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan *basic* yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan mikro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan.

Model Konseptual

Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar yang telah dihasilkan diuraikan bahwa terdapat beberapa alur strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (1) masyarakat miskin perkotaan (2) sasaran pemberdayaan (3) target sasaran dan potensi (4) pendidikan dan pelatihan (5) karakteristik dan keinginan masyarakat (6) kebutuhan pasar dunia usaha/dunia industri (7) mempertemukan antara hasil pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kelompok target potensi oleh agen pembaharuan (8) masyarakat berdaya (9) meningkatkan ekonominya. yang kemudian strategi ini dijadikan suatu model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan. Alur tersebut digambarkan pada strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar berikut:

Gambar 2 Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar



Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja sosial (agen pembaharuan) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan di atas perlu adanya pemetaan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan *basic* yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan mikro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan.

Model Hipotetik

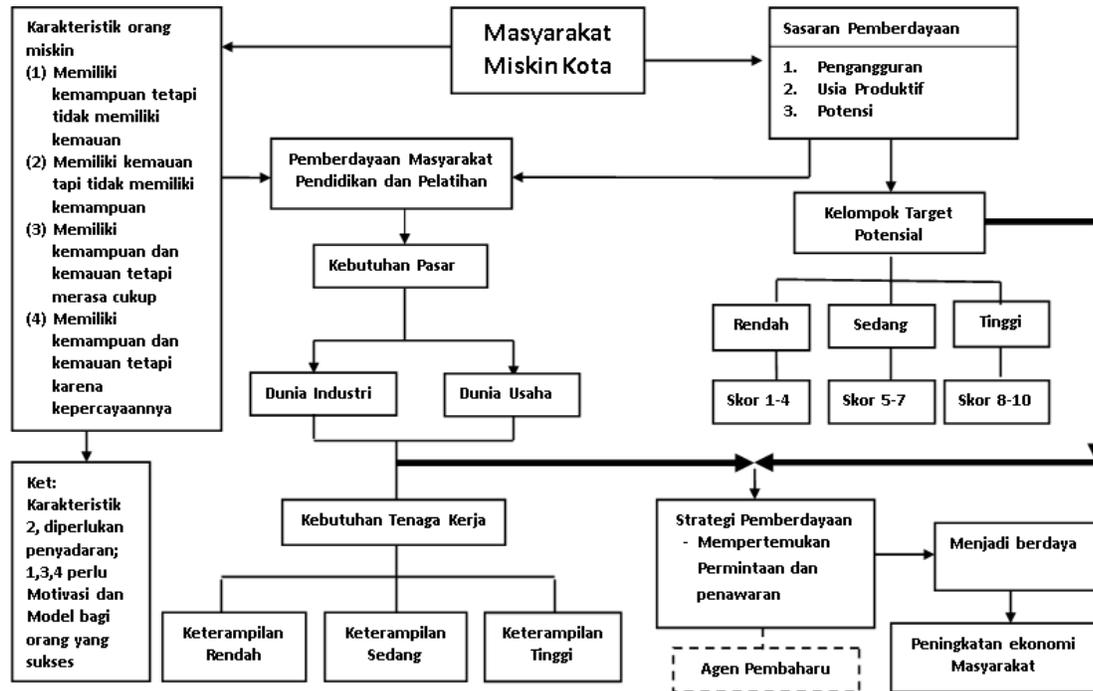
.....

Model Pengembangan

Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar yang telah dihasilkan diuraikan bahwa terdapat beberapa alur strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (1) masyarakat miskin perkotaan (2) sasaran pemberdayaan (3) target sasaran dan potensi (4) pendidikan dan pelatihan (5) karakteristik dan keinginan masyarakat (6) kebutuhan pasar dunia usaha/dunia industri (7) mempertemukan antara hasil pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kelompok target potensi oleh agen pembaharuan (8) masyarakat berdaya (9) meningkatkan ekonominya. yang kemudian strategi ini dijadikan suatu model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan. Alur tersebut

digambarkan pada strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar berikut:

Gambar 2 Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar



Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja sosial (agen pembaharuan) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan di atas perlu adanya pemetaan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan *basic* yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan mikro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan.

BAB 6. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa simpulan utama dalam penelitian ini adalah dihasilkan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP). Simpulan ini didasarkan pada beberapa simpulan berikut.

1. Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas saat ini sudah cukup baik namun kurang maksimal. Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
2. Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas adalah model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis kebutuhan pasar melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas ini dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai sebuah sistem yang melibatkan seluruh *stakeholder* internal maupun eksternal

Saran

1. Perlu adanya evaluasi program pemberdayaan setelah selesai program dilaksanakan.
2. Perlu sinergi antara pengelola dan stake holder dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama supaya program pemberdayaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan menghasilkan sesuai dengan tujuan program yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Martinez and F. Perales, "The Dynamics of Multidimensional Poverty in Contemporary Australia," *Soc. Indic. Res.*, vol. 130, no. 2, pp. 479–496, 2017.
- [2] R. Lister, *Poverty*. Cambridge: Polity Press, 2004.
- [3] M. Thohir, "Memahami Kemiskinan," *J. Dewan Ris. Drh. Jawa Teng.*, vol. 4, no. 1, 2008.
- [4] BPS Jawa Tengah, "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2018," Semarang, 2018.
- [5] BPS Kota Semarang, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2019," 2019.
- [6] M. Ravallion, *Regional Seminar on Definitions and Measurement of Urban Poverty*. Bangkok, Thailand, 2010.
- [7] D. A. Kotzé, "Contradictions and assumptions in community development," *Community Dev. J.*, vol. 22, no. 1, pp. 31–35, 1987.
- [8] A. Sen, *Development as Freedom*. New York, 1999.
- [9] R. M. Van Voorhis and C. Hostetter, "The impact of MSW education on social worker empowerment and commitment to client empowerment through social justice advocacy," *J. Soc. Work Educ.*, vol. 42, no. 1, pp. 105–121, Jan. 2006.
- [10] T. Shildrick and R. MacDonald, "Poverty talk: How people experiencing poverty deny their poverty and why they blame 'the poor,'" *Sociol. Rev.*, vol. 61, no. 2, pp. 285–303, 2013.
- [11] J. McArdle, "Community development tools of trade," *Community Q.*, vol. 16, pp. 47–54, 1989.
- [12] Kalleberg, *Research on Future Skill Demands*. Washington, D.C.: National Academies Press, 2008.
- [13] S. E. Mulyono, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar," Semarang, 2019.
- [14] A. Muslim, R. Karsidi, M. Wijaya, and H. Joebagio, "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community," *Int. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 2, no. 2, p. 80, 2014.
- [15] J. R. Belcher and R. L. Hegar, "Social work and the casualties of capitalism: Empowerment of the urban poor," *J. Progress. Hum. Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–53, 1991.
- [16] W. S. Handapangoda and A. S. Kumara, "The World at Her Fingertips?: Examining the Empowerment Potential of Mobile Phones among Poor Housewives in Sri Lanka," *Gend. Technol. Dev.*, vol. 17, no. 3, pp. 361–385, 2013.
- [17] Borg, W.R. & Gall, M.D. *Educational research: An introduction*. New York: Longman. 1983

LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian
2. Personalia tim Peneliti
3. Surat Perjanjian Penelitian
4. Artikel Ilmiah (*draft, bukti status submission atau reprint*)
5. Dokumentasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (UNIVERSITAS)
DANA DIPA UNNES TAHUN 2022
Nomor: 153.8.4/UN37/PPK.3.1/2022

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan April tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/307/UN37/HK/2022 tanggal 25 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si** : Dosen pada FIP Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan (Universitas) Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pengembangan (Universitas) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/303/UN37/HK/2022 tanggal 24 Maret 2022, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/307/UN37/HK/2022 tanggal 25 Maret 2022, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 Universitas Negeri Semarang;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/347/UN37/HK/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Batch II Universitas Negeri Semarang Tahun 2022;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Pengembangan (Universitas) tahun 2022 dengan judul "Pengembangan Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Semarang";
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sudah termasuk pajak;
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021.

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00 = \text{Rp. } 42.000.000,00$ (empat puluh dua juta Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan RAB penelitian ke SIPP;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00 = \text{Rp. } 18.000.000,00$ (delapan belas juta Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SIPP **paling lambat tanggal 08 Nopember 2022**;
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BTN atas nama SINGKOWO EDY MULYONO dengan nomor rekening 108901500021070;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 08 April 2022** dan berakhir pada **Tanggal 08 Nopember 2022**;

Pasal 6
TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib seperti tersebut di bawah:
- Luaran Wajib :**
- a. Publikasi/Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Publish)
 - b. Feasibility Study (FS) (Sudah Jadi)
 - c. Merek Dagang/ Desain Industri (Terdaftar)
 - d. Prototipe industri/ Produk Inovasi/ Model/ Aplikasi/ Kebijakan (Sudah Jadi)
- (2) **Semua anggota peneliti** harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel **disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih"**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah dan mengisi dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB penelitian;
 3. Instrumen penelitian;
 4. Laporan Kemajuan;
 5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Artikel Ilmiah dan;
 9. Profil penelitian;
 - b. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal **08 Nopember 2022**;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf a, masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **31 Desember 2022**;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6;
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti luaran wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada Tanggal **31 Agustus Tahun 2023** dengan status **PUBLISHED**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan dokumen *hardcopy* sebagai berikut:
1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB penelitian;
 3. Instrumen penelitian;
 4. Laporan Kemajuan;

5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Artikel Ilmiah dan;
 9. Profil penelitian;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

Pasal 9 PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke **Kas BLU UNNES**;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dihitung dari tanggal jatuh tempo (08 Nopember 2022 s.d. 31 Desember 2022);

- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2022**, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi denda berupa mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya ke Kas BLU UNNES dan sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana **DIPA PNBP UNNES (LPPM)** dalam kurun waktu **2 (dua) tahun berturut-turut**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal **31 Agustus 2023** maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan dana biaya publikasi sebesar 5% dari total dana penelitian ke Kas BLU UNNES;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana **DIPA PNBP UNNES (LPPM)** UNNES dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota.

Pasal 12 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke **Kas BLU UNNES**;
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 PAJAK

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES;
- (4) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 15
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang.

Pasal 18
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 19
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RESEARCE DAN TEKNOLOGI" at the top and "UNNES" at the bottom. Inside the ring, it says "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG". The center features a stylized logo of a bird with its wings spread. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Prof. Dr. Suchatuningsih DWP, M. Si
NIP. 196812091997022001

PIHAK KEDUA



Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si
NIP. 196807042005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si
NIP : 196807042005011001
Unit Kerja : FIP
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

“Pengembangan Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Kebutuhan Pasar melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Semarang”

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2022 Nomor 153.8.4/UN37/PPK.3.1/2022, tanggal 08 April 2022, adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke **Kas BLU UNNES**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 08 April 2022

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Prof. Dr. R BENNY RIYANTO M.Hum.
NIP. 196204101987031003



Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si
NIP. 196807042005011001



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: B/2998/UN37.3.1/PG/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si
Alamat : Jln. Dempel Baru Telogosari, Semarang Jawa Tengah

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 08 April 2022
Nomor : 153.8.4/UN37/PPK.3.1/2022
Pekerjaan : Penelitian Penelitian Pengembangan (Universitas) Dana DIPA UNNES Tahun 2022
Pengembangan Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis
Kebutuhan Pasar melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Semarang
Nilai Kontrak : Rp. 60.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke **Kas BLU UNNES** sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 April 2022

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,



Prof. Dr. R BENNY RIYANTO M.Hum.
NIP. 196204101987031003



Dr SUNGKOWO EDY MULYONO S. Pd., M. Si
NIP : 196807042005011001